



Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025



**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB**

KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi untuk merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana kerja Perubahan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan di Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 disusun, semoga bisa terlaksana dan untuk menjadikan periksa.

Lamongan, Juni 2025

EPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN



dr. AINI MAS'UDHA, MMRS
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D TRIWULAN II dan Capaian Renstra PD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	20
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	21
2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan.....	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	24
3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	24
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	26
3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan Pada Tahun 2023.....	27
BAB IV PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Catatan Penting.....	42
4.3 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.....	43
4.4 Rencana Tindak Lanjut.....	43



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Pahlawan No.27 Telp. (0322) 321 182 Lamongan
E-Mail : dppkb@lamongan.go.id, Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/ /Kep/413.109/2025

Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2025

KEPALA DINAS

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999,tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2004,



tentang Pemerintah Daerah.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah



Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pematusan Kabupaten Lamongan Tahun 2025.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025 terdiri dari pejabat di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan

menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : Juni 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan :

- Yth. 1 . Sdr. Inspektur Kab. Lamongan;
2 . Sdr. Kepala Badan Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Lamongan;
3 . Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
4 . Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kab.
Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud
-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ /Kep/413. 109/2025
Tanggal : Juni 2025

**TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Koordinator	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
4.	Anggota	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan Pergerakan
5.	Anggota	Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
7.	Anggota	Kasubbag Keuangan
8.	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9.	Anggota	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal: Juni 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN


dr. AINI MAS'IDHA, MMRS
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 200212 2 006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun berdasarkan penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang

tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Rencana Kerja Perubahan ini dibuat melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk tetap bisa memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan keluarga berencana yang lebih prima sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, rencana kerja dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan, yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perubahan perencanaan pada tahun berjalan karena hasil evaluasi pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus disesuaikan dengan perkembangan kerangka prioritas pembangunan dan keuangan daerah. Secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2025 dalam rangka untuk



menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan kegiatan dan administrasi dapat maksimal/ berjalan lancar.

Rencana kerja Perubahan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 17. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024.
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan berdasarkan ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan PD terhadap sesuatu perubahan atas dokumen perencanaan PD yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun



2025. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.
2. Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Lamongan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Dokumen Perubahan Renja terdiri dari IV Bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1) Latar Belakang;
- 1.2) Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3) Dasar Pertimbangan Perubahan;
- 1.4) Sistematika Penulisan Perubahan Renja;

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

- 1.1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD;
- 1.2) Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 1.3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD dan;
- 1.4) Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1) Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2) Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025;
- 3.3) Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025;

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Catatan Penting



B A B II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) dan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, maka pada tahun 2025 jumlah program kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 Program, 14 Kegiatan 46 Sub Kegiatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya untuk mewujudkan capaian kinerja selama 1 tahun yakni pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mengambil langkah, yakni berupa kebijakan, program dan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan serta 44 sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Dari anggaran 23.345.095.865,00 terealisasi sebesar Rp. 22.702.306.486,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,25%.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program teknis. Terkait dengan target kinerjanya sampai dengan Tribulan 1, sebagian besar program telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun sebagian besar program tersebut belum mencapai target realisasi anggaran. Berikut ini penjelasan capaian kinerja dan anggaran program sampai dengan Tribulan 1 tahun anggaran 2025 (Tabel 2.1).



Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan dan APBN BKKBN Tahun Anggaran 2025 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan beberapa program diatas tidak dapat mencapai target kinerja hingga tribulan 1, yaitu :

- a. Mengoptimalkan pelayanan kontrasepsi dengan memanfaatkan Asuransi Kesehatan yang dimiliki oleh Akseptor
- b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang bersumber dari DAK fisik maupun non fisik (BOKB)

Penjabaran data dan nominal realisasi anggaran Program dan kegiatan Renja Tahun 2024 dan realisasi anggaran Program dan Kegiatan Renja 2025 hingga Bulan Maret tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

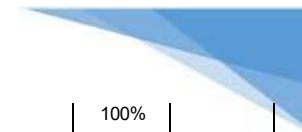


Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s/d Triwulan 1)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)		
Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85,02	8.995.154.636	85,02	8.995.154.636	82	5.323.369.189	-	1.129.276.437	-	21%	167,02	10.124.431.073	196%	113%	Dinas PPKB	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	7 Dokumen	47.007.200	7 Dokumen	47.007.200	8 Dokumen	35.668.100	4 Dokumen	3.930.700	50%	11%	11 Dokumen	50.937.900	157%	108%		
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.179.900	3 Dokumen	9.179.900	3 Dokumen	11.701.700	1 Dokumen	3.930.700	33%	34%	4 Dokumen	13.110.600	133%	143%		
	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	37.827.300	4 Laporan	37.827.300	5 Laporan	23.966.400	3 Laporan	0	60%	0%	7 Laporan	37.827.300	175%	100%		
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	26 Dokumen	4.219.180.427	26 Dokumen	4.219.180.427	26 Dokumen	4.884.077.077		1.114.271.659		23%		5.333.452.086		126%		



2.14.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	4.139.194.927	50 orang/bulan	4.139.194.927	40 Orang/bulan	4.863.603.477	40 orang/bulan	1.111.526.459	100 %	23%	90 orang/bulan	5.250.721.386	100%	127%		
2.14.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	59.985.900	4 Dokumen	59.985.900	-	-	-	0	-	0	4 Dokumen	59.985.900	100%	100%		
2.14.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	9.999.600	12 Laporan	9.999.600	12 Laporan	10.780.200	3 Laporan	1.259.300	25 %	12%	15 Laporan	11.258.900	125%	113%		
2.14.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	9.693.400	3 Laporan	1.485.900	25 %	15%	15 Laporan	11.485.900	125%	115%		
2.14.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	12 Laporan	85.867.380	12 Laporan	85.867.380	12 Laporan	92.742.600	3 Laporan	-	25 %	0%	15 Laporan	85.867.380	125%	100%		
2.14.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.499.300	12 Paket	9.499.300	12 Paket	9.499.300	3 Paket	0	25 %	0%	15 Paket	9.499.300	125%	100%		
2.14.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	9.746.600	16 Paket	9.746.600	16 Paket	9.747.900	3 Paket	0	19 %	0%	19 Paket	9.746.600		100%		
2.14.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.995.000	3 Paket	29.995.000	3 Paket	29.104.400	1 Paket	0	33 %	0%	4 Paket	29.995.000		100%		

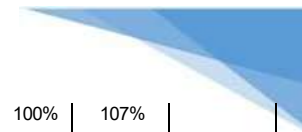


2.14.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	9.998.30 0	7 Paket	9.998.30 0	6 Paket	9.400.00 0	2 Paket	0	33 %	0%	9 Pak et	9.998.300		100%		
2.14.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4 Dokum en	4.620.00 0	4 Dokum en	4.620.00 0	4 Dokum en	9.252.00 0	1 Dokum en	0	25 %	0%	5 Dok ume n	4.620.000		100%		
2.14.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Lapora n	22.008.1 80	11 Lapora n	22.008.1 80	3 Laporan	25.739.0 00	1 Lapora n	0	33 %	0%	12 Lap oran	22.008.18 0		100%		
2.14.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan	100%	2.124.37 3.183	100%	2.124.37 3.183	100%	-	0	0	-	0%	100 %	2.124.373 .183	100%	100%		
2.14.01.2.0 7.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	102 Unit	2.124.37 3.183	102 Unit	2.124.37 3.183	-	-	-	0	-	0%	102 unit	2.124.373 .183	100%	100%		
2.14.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosesntase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia dengan baik	100%	681.232. 142	100%	681.232. 142	100%	540.040. 414	25%	160.730. 250	25 %	30%	125 %	841.962.3 92	125,0 0%	124%		
2.14.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lapora n	100.694. 982	4 Lapora n	100.694. 982	12 Laporan	126.794. 414	3 Lapora n	0	25 %	0%	7 Lap oran	100.694.9 82	175%	100%		
2.14.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Lapora n	580.537. 160	27 Lapora n	580.537. 160	12 Laporan	413.246. 000	3 Lapora n	160.730. 250	25 %	39%	30 Lap oran	741.267.4 10	111%	128%		
2.14.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosesntase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	80%	1.767.21 8.504	80%	1.767.21 8.504	80%	168.367. 702		11.074.0 78	0%	7%	80%	1.778.292 .582	100%	101%		

	2.14.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	68.501.800	4 Unit	68.501.800	2 Unit	60.765.000	0 Unit	8.108.750	0%	13%	4 Unit	76.610.550	100%	112%		
	2.14.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	44.873.400	6 Unit	44.873.400	5 Unit	51.875.174	0 Unit	2.965.328	0%	6%	6 Unit	47.838.728	100%	107%		
	2.14.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	9.918.000	21 Unit	9.918.000	11 Unit	10.825.000	0 Unit	0	0%	0%	21 Unit	9.918.000	100%	100%		
	2.14.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Gedung	1.643.925.304	28 Gedung	1.643.925.304	1 Unit	44.902.528	0 Unit	0	0%	0%	28 Gedung	1.643.925.304	100%	100%		
		Penataan Organisasi			70.275.800		70.275.800		-		0	-	0%	-	70.275.800		100%		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	70.275.800	1 Laporan	70.275.800	-	-	-	0	-	-	1 Laporan	70.275.800	100%	100%		
Mengendalkan Angka Kelahiran	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Data Informasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	100%	240.653.950	100%	240.653.950	100%	799.448.500	100%	5.608.300	100%	1%	100%	246.262.250	100%	102%		

2.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1 Kali	34.949.700	1 Kali	34.949.700	4 Kali	37.615.000	0	0	0%	0%	1 Kali	34.949.700	100%	100%		
2.14.02.2.0 1.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.100.000	1 Dokumen	9.100.000	1 Dokumen	9.040.000	0	0	0%	0%	1 Dokumen	9.100.000	100%	100%		
2.14.02.2.0 1.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	8.399.900	1 Kegiatan	8.399.900	1 Kegiatan	9.777.500	0	0	0%	0%	1 Kegiatan	8.399.900	100%	100%		
2.14.02.2.0 1.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	2 kegiatan	9.099.800	2 kegiatan	9.099.800	1 Kegiatan	9.722.500	0	0	0%	0%	2 Kegiatan	9.099.800	100%	100%		
2.14.02.2.0 1.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 kegiatan	8.350.000	1 kegiatan	8.350.000	1 Kegiatan	9.075.000	0	0	0%	0%	1 Kegiatan	8.350.000	100%	100%		
2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang tersedia	1 Dokumen	205.704.250	1 Dokumen	205.704.250	4 Dokumen	761.833.500	0	5.608.300	0%	1%	1 Dokumen	211.312.550	100%	103%		

2.14.02.2.0 2.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokum en	9.199.90 0	1 Dokum en	9.199.90 0	1 Dokum en	9.010.50 0	0	0	0%	0%	1 Dok ume n	9.199.900	100%	100%		
2.14.02.2.0 2.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		-	0	-	0	6 Dokum en	60.000.0 00	0	5.608.30 0	0%	9%	-	5.608.300	-	0%		
2.14.02.2.0 2.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Lapora n	51.299.8 00	12 Lapora n	51.299.8 00	13 Laporan	360.000. 000	0	0	0%	0%	12 Lap oran	51.299.80 0	100%	100%		
2.14.02.2.0 2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokum en	136.004. 550	12 Dokum en	136.004. 550	24 Dokum en	324.000. 000	0	0	0%	0%	12 Dok ume n	136.004.5 50	100%	100%		
2.14.02.2.0 2.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokum en	9.200.00 0	1 Dokum en	9.200.00 0	1 Dokum en	8.823.00 0	0	0	0%	0%	1 Dok ume n	9.200.000	100%	100%		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,13%	6.477.60 2.100	10,13%	6.477.60 2.100	22,28%	9.543.32 1.000		81.000.0 00	0%	1%		6.558.602 .100		101%		
2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Toga Toma sebagai Mitra Kerja yang aktif	880 Orang	1.931.85 7.100	880 Orang	1.931.85 7.100	885 Orang	2.046.35 0.000		81.000.0 00	0%	4%		2.012.857 .100		104%		
2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Lapora n	78.299.8 00	4 Lapora n	78.299.8 00	-	-		0	0%	0%	4 Lap oran	78.299.80 0	100%	100%		



	2.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	324 Lapora n	1.160.46 8.100	324 Lapora n	1.160.46 8.100	1 Laporan	1.161.00 0.000	0	81.000.0 00	0%	7%	324 Lap oran	1.241.468 .100	100%	107%	
	2.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	324 Lapora n	404.999. 900	324 Lapora n	404.999. 900	27 Laporan	540.000. 000	0 Lapora n	0	0%	0%	324 Lap oran	404.999.9 00	100%	100%	
	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokum en	98.449.3 00	2 Dokum en	98.449.3 00	2 Dokum en	100.000. 000	0 Dokum en	0	0%	0%	2 Dok ume n	98.449.30 0	100%	100%	
	2.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organis asi	189.640. 000	2 Organis asi	189.640. 000	4 Organis asi	245.350. 000	0 Organis asi	0	0%	0%	2 Org anis asi	189.640.0 00	100%	100%	

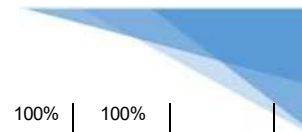


2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	63 Orang	1.705.524.900	63 Orang	1.705.524.900	78 Orang	3.166.000.000	53 Orang	0	68 %	0%	63 Orang	1.705.524.900	100%	100%		
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4201 Orang	1.705.524.900	4201 Orang	1.705.524.900	3166 Orang	3.166.000.000		0	0%	0%		1.705.524.900		100%		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat/cara KB (Unmetneed)	4,48%	1.088.770.300	4,48%	1.088.770.300	6,30%	1.665.691.000		0	0%	0%	4,48 %	1.088.770.300	100%	100%		
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56 Laporan	30.497.500	56 Laporan	30.497.500		-		0	0%	-	56 Laporan	30.497.500	100%	100%		
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3461 Orang	1.025.772.900	3461 Orang	1.025.772.900	4204 Orang	1.653.291.000		0		0%	3461 Orang	1.025.772.900	100%	100%		
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56 Laporan	32.499.900	56 Laporan	32.499.900	12 Laporan	12.400.000	1 Laporan	0	8%	0%	57 Laporan	32.499.900	102%	100%		

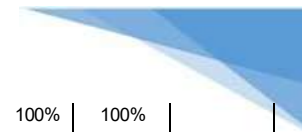


	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	1.751.449.800	1 Organisasi	1.751.449.800	2 Organisasi	2.665.280.000	0 Organisasi	0	0%	0%	1 Organisasi	1.751.449.800	100%	100%		
	2.14.03.2.04.0005	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	2.950.000	1 Dokumen	2.950.000	-	-	0 Dokumen		0%	0%	1 Dokumen	2.950.000	100%	100%		
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas		-		-		23 Unit	1.446.500.000	0 unit	0	0%		-	-	-	-		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	111 Kampung KB	1.748.499.800	111 Kampung KB	1.748.499.800	111 Kampung	1.218.780.000	0 Kampung	0	0%	0%	111 kampung	1.748.499.800	100%	100%		
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Poktan yang aktif dalam pertemuan pembinaan BKB, BKR, BKL	61,16%	6.988.895.800	61,16%	6.988.895.800	70,56%	7.099.621.000		0	0%	0%		6.988.895.800		100%		

2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapat Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	90,00%	6.884.89 9.200	90,00%	6.884.89 9.200	90%	217.814. 500		0	0%	0%		6.884.899 .200		100%		
2.14.04.2.0 1.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	240 Keluarg a	48.022.2 00	240 Keluarg a	48.022.2 00	250 Keluarg a	20.614.5 00	60 Keluarg a	0	25 %	0%	300 Kelu arga	48.022.20 0	125%	100%		
2.14.04.2.0 1.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-	-	-	7 Laporan	67.200.0 00	0 Lapora n	0	0%	0%	-	-	-	0%		
2.14.04.2.0 1.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	31 Unit	294.110. 000	31 Unit	294.110. 000	10 Unit	130.000. 000	0 Unit	0	0%	0%	31 Unit	294.110.0 00	100%	100%		



2.14.04.2.0 1.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	45700 Orang	6.542.767.000	45700 Orang	6.542.767.000	-	-	-	0	-	-	45700 Orang	6.542.767.000	100%	100%		
2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	1 Organisasi	103.996.600	1 Organisasi	103.996.600	2 Organisasi	6.881.806.500		0	0%	0%	1 Organisasi	103.996.600	100%	100%		
2.14.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (UPPKA)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	4.800.000	5 Organisasi	4.800.000	-	16.500.000	0 Organisasi	0	0%	0%	5 Organisasi	4.800.000	100%	100%		



	2.14.04.2.0 2.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	99.196.600	2 Laporan	99.196.600	1 Laporan	27.706.500	0 Laporan	0	0%	0%	2 Laporan	99.196.600	100%	100%	
	2.14.04.2.0 2.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting	-	-	-	-	10 Laporan	3.108.000.000	0 Laporan	0	0%	0%	-	-	-	-	
	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	-	-	-	-	10 Laporan	3.729.600.000	0 Laporan	0	0%	0%	-	-	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Target Kinerja IKU pada Tahun 2024 Angka prevalensi kontrasepsi *modern* (*modern contraceptive rate* (mCPR) sebesar 79,42% dapat terealisasi sebesar 76,22%. Berikut ini disajikan analisis pencapaian pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn. 2022	Thn. 2023	Thn. 2024	Thn. 2025	Thn. 2023	Thn. 2024	Thn. 2025	Thn. 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	1,87	1,89	1,87	1,85	1,83	1,87	1,87	1,87	1,87	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	76,22 %	79,40 %	79,41 %	79,42 %	79,43 %	76,87 %	76,22 %	76,22 %	76,23 %	
3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak dipenuhi (unmet need)	-	4,48 %	6,6 %	6,5 %	6,4 %	6,3 %	7,10 %	4,48%	4,48%	4,46%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam urusan pengendalian penduduk.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lamongan adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penggerakan program Keluarga Berencana

Hal ini disebabkan munculnya opini di masyarakat, bahwa urusan program KB adalah urusan perempuan. Pemahaman semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan. Pada dasarnya pemahaman Program KB adalah pembangunan berbasis keluarga dan masyarakat, yang menyangkut berbagai aspek pembangunan. Menghadapi permasalahan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk merubah pemahaman masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana, dengan tujuan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam penggerakan Program KB, yang didukung oleh segenap stakeholder. Peningkatan partisipasi dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.

2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang berkaitan dalam pelayanan

Hal ini disebabkan karena muncul opini bahwa pelayanan ber-KB masih



ada yang membayar. Pemahaman semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena pelayanan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kepada masyarakat merupakan pelayanan gratis. Namun, dalam pelayanan ber-KB ada syarat yang salah satunya adalah harus mempunyai BPJS. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu koordinasi dan komunikasi terkait kebijakan pada pelayanan, agar antara pihak yang berkaitan mempunyai persepsi yang sama.

3. Rendahnya Jumlah PKB/PLKB di Kabupaten Lamongan

Diketahui bahwa perbandingan jumlah petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dengan wilayah binaan tidak proporsional lagi. Pada saat ini, seorang PKB/PLKB harus membina 6-8 desa/kelurahan, idealnya setiap PKB/PLKB membina 2 desa/kelurahan.

4. Masih Rendahnya Ketahanan dan Kualitas Lingkungan Keluarga

Pada kenyataannya masih banyak keluarga yang rentan terhadap kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri hal tersebut disebabkan karena kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya masih sangat rendah, untuk itu perlu dorongan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus hidup yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari perencanaan dan keuangan yang kemudian di konsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Kerja (RAK) yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. RAK kemudian di kirim kepada BPKAD Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh TPAD (Tim Penyusun Anggaran Daerah) untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan

dana) untuk diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD 2021 - 2026 dan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk Perubahan Anggaran 2025, tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan baik melalui Musrenbang Kecamatan maupun melalui anggota DPRD.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lamongan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
	NIHIL				



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2025-2029 yang memiliki tujuan yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas”

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dan Tema RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Jawa Timur Tahun 2025 adalah “Pemulihan Ekonomi serta Pembangunan Infrastruktur Wilayah Selatan Jawa Timur, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Reformasi Pelayanan Dasar seperti kesehatan”. Selain itu sesuai dengan Tema RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.



Prioritas Pembangunan Jatim yang terkait dengan DPPKB yaitu “Peningkatan layanan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan” sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang terkait dengan DPPKB yaitu Prioritas Nasional 3, “Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing”.

Secara spesifik terkait dengan tema RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas, Infrastruktur Strategis Dan Pengembangan Sektor Unggulan”, maka pada Sasaran Renstra DPPKB yang menjadi upaya dalam mencapai tujuan utama diantaranya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana.

Selanjutnya terkait dengan Kebijakan Pusat dan Propinsi, DPPKB menetapkan arah kebijakan-kebijakan, sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan Pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
3. Pendewasaan Usia Perkawinan.
4. Peningkatan Pembangunan Keluarga.
5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi.

Kebijakan dalam RPJMD yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan adalah Peningkatan Keluarga Berencana.

Adapun program pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yang berkaitan dengan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pengendalian Penduduk
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- d. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

- Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target
- target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target
 - target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja.

Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan di dalam RPJMD termasuk pada tujuan di Misi 2 sebagai berikut :

“Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman”.

Sedangkan Tujuan yang ada di Renstra DPPKB yaitu **”Mewujudkan Ketahanan Keluarga yang Sejahtera dan Berkeadilan Gender”** Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yaitu **”Mengendalikan Angka Kelahiran”.**

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Berikut ini kami sampaikan Matriks Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan:

Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berkualitas	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 14-49 Tahun	$TFR = \sum_{i=15-49} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{\text{Jumlah kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia ke-i}}{\text{Jumlah penduduk usia ke-i}}$	1,91	1,89	1,87	1,85	1,83	1,81

Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mengendalikan Angka Kelahiran	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) (%)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah PUS Keseluruhan}} \times 100\%$	79,30 %	79,40 %	79,41 %	79,42 %	79,43 %	79,44 %

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Untuk pelaksanaan pembangunan urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana tersebut terdapat 4 Program, 15 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan. Berbagai program, dan Kegiatan/ Sub kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkup OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu sendiri untuk mengatur hal-hal yang administrative dan operasional guna menunjang urusan pemerintah daerah dan juga secara teknis dilaksanakan secara menyebar ke berbagai kecamatan. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya terfokus pada kelompok kegiatan dan organisasi masyarakat namun juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Sumber pendanaan pagu indikatif yang mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini seluruhnya berasal dari APBD, dimana perolehan APBD tersebut didukung juga oleh Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana. Total Pagu Kebutuhan Indikatif urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 awalnya sebesar Rp. 22.800.490.189,00 namun dalam rangka Perubahan Angaran Keuangan APBD Kabupaten Lamongan menjadi Rp. 23.163.286.593,04. Program yang pada RKPD 2025 terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan berubah menjadi 4 Program, 15 Kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan di RKPD Perubahan 2025.

Rincian dari perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

NAMA PD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LAMONGAN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
		Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Program	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							23.163.286.593,04	23.551.466.702,00	388.180.109	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	IKM Dinas PPKB	82	IKM Dinas PPKB	82	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	5.720.896.093,04	5.989.076.202,00	268.180.109	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	8 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	35.668.100,00	35.668.100,00	-	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	11.701.750,00	11.701.750,00	-	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	23.966.350,00	23.966.350,00	-	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	26 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	26 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4.884.077.077,04	5.160.943.600,00	276.866.523	



2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4.863.603.477,04	5.140.470.000,00	276.866.523	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10.780.200,00	10.780.200,00	-	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.693.400,00	9.693.400,00	-	
2.14.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan baik	-	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan baik	-	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	0		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	0		



2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	12 Laporan	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	92.742.800,00	92.742.800,00	-	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.499.500,00	9.499.500,00	-	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paet	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.747.900,00	9.747.900,00	-	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	29.104.400,00	29.104.400,00	-	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.400.000,00	9.400.000,00	-	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.252.000,00	9.252.000,00	-	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25.739.000,00	25.739.000,00	-	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan	100%	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	0	-	



2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	0		
2.14.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	0	-	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosesntase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia dengan baik	100%	Prosesntase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia dengan baik	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	540.040.414,00	531.354.000,00	- 8.686.414	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	126.794.414,00	118.108.000,00	- 8.686.414	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	413.246.000,00	413.246.000,00	-	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosesntase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	80%	Prosesntase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	80%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	168.367.702,00	168.367.702,00	-	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	60.765.000,00	60.765.000,00	-	



2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	51.875.173,80	51.875.173,80	-	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10.825.000,00	10.825.000,00	-	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	44.902.528,20	44.902.528,20	-	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Data Informasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	100%	Persentase Data Informasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	799.448.500,00	919.448.500,00	120.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4 Kali	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4 Kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	37.615.000,00	157.615.000,00	120.000.000	



2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.040.000,00	129.040.000,00	120.000.000	
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.777.500,00	9.777.500,00	-	
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.722.500,00	9.722.500,00	-	
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.075.000,00	9.075.000,00	-	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang tersedia	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang tersedia	4 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	761.833.500,00	761.833.500,00	-	



2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.010.500,00	9.010.500,00	-	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		6 Laporan		6 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	13 Laporan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	13 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	360.000.000,00	360.000.000,00	-	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	324.000.000,00	324.000.000,00	-	
2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	8.823.000,00	8.823.000,00	-	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,28%	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,28%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.543.321.000,00	9.543.321.000,00	-	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Toga Toma sebagai Mitra Kerja yang aktif	885 Orang	Jumlah Toga Toma sebagai Mitra Kerja yang aktif	885 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	2.046.350.000,00	2.046.350.000,00	-	



2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.161.000.000,00	1.161.000.000,00	-	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	27 Laporan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	27 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	540.000.000,00	540.000.000,00	-	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	



2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		4 Organisasi		4 Organisasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	245.350.000,00	245.350.000,00	-	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	78 Orang	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	78 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.166.000.000,00	3.166.000.000,00	-	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3166 Kader	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3166 Kader	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.166.000.000,00	3.166.000.000,00	-	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat/cara KB (Unmeetneed)	6,30%	Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat/cara KB (Unmeetneed)	6,30%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.665.691.000,00	1.665.691.000,00	-	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	0	-	



2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4204 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4204 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.653.291.000,00	1.653.291.000,00	-	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	12.400.000,00	12.400.000,00	-	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Organisasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	2.665.280.000,00	2.665.280.000,00	-	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	263 Unit	Jumlah DASHAT di Kampung KB	263 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.446.500.000,00	1.446.500.000,00	-	



2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	111 Kampung	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	111 Kampung	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.218.780.000,00	1.218.780.000,00	-	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Poktan yang aktif dalam pertemuan pembinaan BKB, BKR, BKL	70,56%	Cakupan Anggota Poktan yang aktif dalam pertemuan pembinaan BKB, BKR, BKL	70,56%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.099.621.000,00	7.099.621.000,00	-	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapat Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	90%	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapat Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	90%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	217.814.500,00	217.814.500,00	-	
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	250 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	250 keluarga	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	20.614.500,00	20.614.500,00	-	



2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	7 Laporan	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	7 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	67.200.000,00	67.200.000,00	-	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	130.000.000,00	130.000.000,00	-	
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2 Kelompok	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2 Kelompok	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	0	-	



2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	2 Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	2 Organisasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	6.881.806.500,00	6.881.806.500,00	-	
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (UPPKA)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Penanganana dan Sekretariat Stunting)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan			27.706.500,00	27.706.500,00		



2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting	10 Laporan	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting	10 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.108.000.000,00	3.108.000.000,00		
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	10 Laporan	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	10 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.729.600.000,00	3.729.600.000,00		



BAB IV

PENUTUP

Perubahan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yang merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang dipergunakan oleh Unit Kerja sebagai usulan perubahan program dan kegiatan pada tahun berjalan guna mewujudkan tercapainya pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029 dengan menyesuaikan program Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi PD.

4.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini merupakan bagian dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah merupakan suatu dokumen perencanaan perubahan program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lamongan.

Dari uraian yang kami sajikan mulai Bab I sampai dengan Bab IV dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lamongan membutuhkan tambahan anggaran untuk dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas.

4.2 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Lamongan tahun 2025 dibuat dengan menyesuaikan perkembangan yang menjadi prioritas, yaitu pada penyusunan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan).



4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPPKB Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perubahan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perubahan perencanaan pada Perangkat Daerah dengan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan agar Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf DPPKB Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

1. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.4 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan tahun 2025.

Lamongan, Juni 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN



dr. AINI MAS IDHA, MMRS
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 200212 2 006